

**PEMETAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2020  
MENGUNAKAN ANALISIS *BILOT***

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya*



**Oleh:  
LISE HAKIKI  
NIM. 17037027/2017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III STATISTIKA  
DEPARTEMEN STATISTIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR**


**PEMETAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2020  
MENGUNAKAN ANALISIS *BILOT***

Nama : Lise Hakiki  
NIM/Tahun Masuk : 17037027/2017  
Program Studi : DIII Statistika  
Departemen : Statistika  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Padang, 08 Juni 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Akademik



**Dra. Nonong Amalita, M.Si**  
NIP. 19690615 199303 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN AKHIR




Nama : Lise Hakiki  
NIM/TM : 17037027/2017  
Program Studi : DIII Statistika  
Departemen : Statistika  
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

### PEMETAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2020 MENGUNAKAN ANALISIS *BIPLOT*

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi DIII Statistika Departemen Statistika Fakultas Matematika  
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang

Padang, 08 Juni 2022

#### Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Nonong Amalita, M.Si	1. 
2. Anggota	: Dr. Dony Permana, M.Si	2. 
3. Anggota	: Admi Salma, S.Pd., M.Si	3. 

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lise Hakiki  
NIM/TM : 17037027/2017  
Program Studi : DIII Statistika  
Departemen : Statistika  
Fakultas : MIPA UNP

Dengan ini menyatakan bahwa, Tugas akhir saya dengan judul "**Pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2020 Menggunakan Analisis Biplot**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,  
Ketua Jurusan Statistika,



Dr. Dony Permana, M.Si.  
NIP. 19750127 200604 1 001

Saya yang menyatakan,



Lise Hakiki  
NIM. 17037027

## ABSTRAK

### **Lise Hakiki: Pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2020 Menggunakan Analisis *Biplot***

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Permasalahan yang dibahas adalah jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat yang dalam beberapa tahun ini cenderung mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator PPKS.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Buku Data PPKS dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) Tahun 2020 pada situs Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Objek yang digunakan adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan peubah sebanyak 26 variabel.

Berdasarkan hasil analisis terdapat lima kelompok daerah yang memiliki karakteristik yang sama. Kelompok 1 terdiri dari Kabupaten 50 Kota. Kelompok 2 terdiri dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok 3 terdiri dari Kota Padang. Kelompok 4 terdiri dari Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, dan Kota Solok. Kelompok 5 terdiri dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Pariaman.

**Kata Kunci:** Analisis *Biplot*, Pemetaan, PPKS.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2020 Menggunakan Analisis *Biplot*”**. Selanjutnya, shalawat beserta salam untuk nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi Diploma III Statistika Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, serta ide-idenya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, yaitu:

1. Ibu Dra. Nonong Amalita, M.Si., pembimbing dan penasihat akademik.
2. Bapak Dr. Dony Permana, M.Si., penguji Tugas Akhir dan Kepala Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Admi Salma, S.Pd, M.Si., penguji Tugas Akhir.
4. Bapak Dodi Vionanda, M.Si. Ph.D., Koordinator Program Studi DIII Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
5. Bapak/Ibu Dosen dan civitas akademik Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.

6. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat, nasihat, dan bantuan kepada peneliti.
7. Sahabat, teman, rekan-rekan Statistika 2017, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bimbingan, bantuan, dan kerjasamanya dapat dibalas oleh Allah SWT sebagai amala ibadah.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Padang, Oktober 2022

Lise Hakiki

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Batasan Masalah.....	8
C.Rumusan Masalah.....	8
D.Tujuan Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).....	10
B.Standardisasi Data.....	24
C.Data Peubah Ganda.....	24
D.Vektor dan Matriks.....	25
E.Nilai Eigen dan Vektor Eigen.....	29
F.Penguraian Nilai Singular.....	29
G.Analisis <i>Biplot</i> .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A.Jenis Penelitian.....	38
B.Jenis dan Sumber Data.....	38
C.Variabel Penelitian.....	38
D.Struktur Data Penelitian.....	39
E.Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A.Deskripsi Data.....	41
B.Analisis Data.....	43
C.Pembahasan.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A.Kesimpulan.....	55
B.Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>



**LAMPIRAN ..... 59**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	5
2. Variabel Penelitian .....	38
3. Struktur Data PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 .....	39
4. Data Variabel Tertinggi dan Terendah Berdasarkan .....	41
5. Ukuran Panjang Masing-masing Vektor Variabel .....	48
6. Hubungan Antar Variabel .....	49
7. Kelompok Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiripan Indikator .....	51

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020.....	3
2. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	4
3. Biplot dari Indikator PPKS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Indikator PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 .....	60
2. Data yang disusun dalam bentuk Matriks X .....	61
3. Matriks X yang sudah di transposkan .....	62
4. Data yang sudah di standarisasi .....	63
5. Matriks Simetris $X'X$ .....	63
6. Matriks A .....	64
7. Matriks L .....	64
8. Matriks U .....	65
9. Matriks $G=U$ .....	65
10. Matriks $H=AL$ .....	66
11. Ukuran Panjang Vektor Masing-masing Variabel .....	67
12. Besar Sudut Antar Variabel .....	69

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan sosial termasuk salah satu hal yang sangat penting untuk di evaluasi karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan suatu pemerintahan, baik terhadap ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

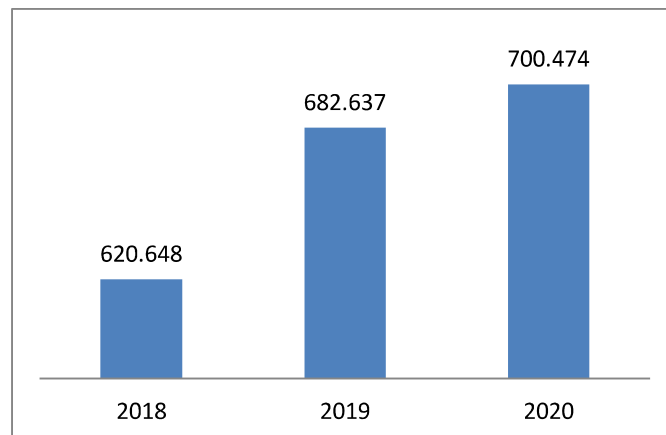
Namun menurut Kementerian Keuangan RI permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Banyak warna negara yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang muncul pada masyarakat Indonesia adalah menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan, dan meningkatnya kasus kriminalitas.

Selain itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dihitung berdasarkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan yaitu, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial adalah Sumatera Barat. Menurut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat,

permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Gambar 1.



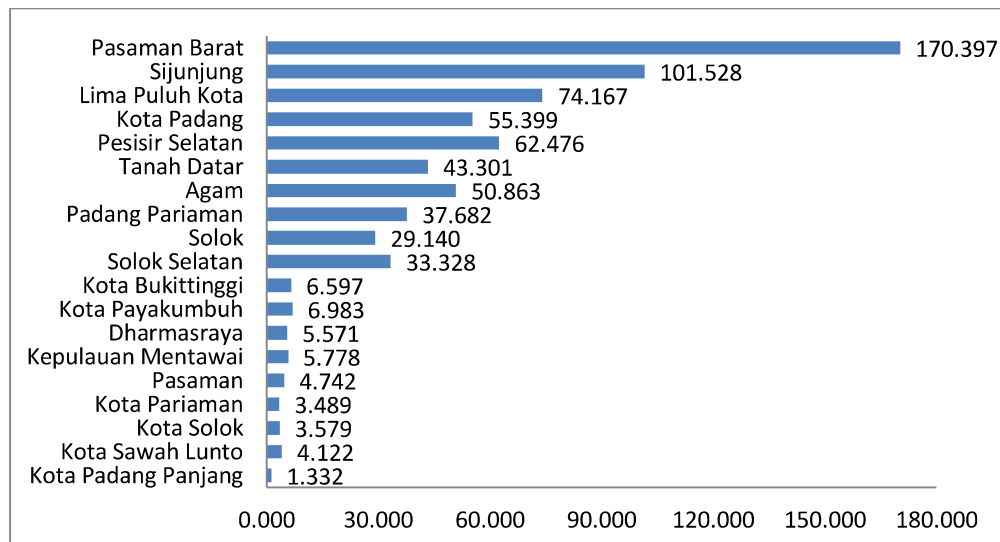
**Gambar 1. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020**

Sumber: Buku Data PPKS dan PSKS Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah PPKS yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Secara umum permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh kemiskinan, gelandangan, pengemis, anak jalanan, kemandirian dan produktivitas, aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai, peranan kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal, kualitas manajemen dan pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat 2016-2021).

Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten/kota yang masing-masingnya mempunyai permasalahan kesejahteraan sosial yang berbeda. Tergantung bagaimana wilayah dan kondisi disetiap kabupaten/kota. Jumlah PPKS di Provinsi

Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020**

Sumber: Buku Data PPKS dan PSKS Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang memiliki tingkat PPKS tertinggi di Sumatera Barat. Menurut buku Data PPKS dan PSKS tahun 2020 PPKS di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah PPKS di Kabupaten Pasaman Barat adalah 182.919 jiwa. Jumlah tersebut cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, tapi jumlah PPKS di Kabupaten Pasaman Barat masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Penurunan terjadi karena adanya peningkatan pada sektor pertanian di Pasaman Barat. Akan tetapi peningkatan tersebut hanya mampu mengurangi angka kemiskinan dalam skala kecil (Embri, 2015). Kabupaten/kota yang memiliki tingkat PPKS yang rendah adalah Kota Padang Panjang. Persentase



penanganan PPKS di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2020 penanganan dilakukan melalui pemberian bantuan kebutuhan dasar dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersaama (KUBE).

Berdasarkan Buku Data PPKS dan PSKS tahun 2020 populasi PPKS yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi pada populasi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah PPKS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Jenis PPKS	2020 (Jiwa)
1	Fakir Miskin	569.805
2	Lanjut Usia Terlantar	46.755
3	Korban Bencana Alam	24.288
4	Perempuan Rawan Sosial	23.481
5	Penyandang Disabilitas	19.049
6	Anak Terlantar	5.861
7	Anak Dengan Kedisabilitas	4.874
8	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1.131
9	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	983
10	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	875
11	Korban Bencana Sosial	590
12	Orang Dengan HIV/AIDS	472
13	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	461
14	Korban Penyalahgunaan Napza	324
15	Korban Tindak Kekerasan	320
16	Anak Korban Tindak Kekerasan	285
17	Pemulung	233
18	Anak Balita Terlantar	196
19	Anak Jalanan	163
20	Pengemis	135
21	Komunitas Adat Terpencil	124

No	Jenis PPKS	2020 (Jiwa)
22	Tuna Susila	30
23	Gelandangan	20
24	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	12
25	Korban Traficking	5
26	Kelompok Minoritas	2
	<b>Jumlah</b>	<b>700.474</b>

Sumber: Buku Data PPKS dan PSKS Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1, permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Provinsi Sumatera Barat cenderung tinggi. Bila hal ini di abaikan maka akan mengarah pada friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa (Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rohelan, Ellan (2003) dengan judul “Analisis Permasalahan Sosial Di Provinsi Jawa Barat”, membahas tentang permasalahan sosial yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis gerombol dan analisis *biplo*t. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 kabupaten/kota di Jawa Barat dan 16 peubah permasalahan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang dan Kabupaten Garut, memiliki permasalahan sosial yang tinggi pada anak terlantar, lansia, dan keluarga berumah tidak layak huni. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cirebon juga memiliki permasalahan sosial yang tinggi yaitu pada permasalahan fakir miskin, sedangkan kabupaten bogor memiliki permasalahan yang tinggi pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Ubai (2011) dengan judul “Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Menggunakan

Metode *Fuzzy C-Mean Clustering* dan *Biplot*”, membahas mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2009. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 provinsi yang ada di Indonesia dan dengan 19 variabel penelitian. Hasil analisis menunjukkan permasalahan kemiskinan, keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni dan anak terlantar merupakan tiga vektor terpanjang dari vektor-vektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga permasalahan sosial tersebut merupakan permasalahan yang sangat beragam pada setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Dan permasalahan kemiskinanlah yang sebagian besar menjadi penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan sosial lainnya di Indonesia.

Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2011:246) semakin banyak peubah yang diukur dan semakin banyak objek yang diamati, maka ukuran tabel yang dimiliki akan semakin besar dan semakin sulit untuk menginterpretasikannya. Untuk itu diperlukan suatu metode yang mampu mempermudah interpretasi dari data yang dimiliki. Metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah analisis *biplot*. Selain itu, analisis *biplot* juga dapat memberikan gambaran secara grafis tentang keragaman variabel, kedekatan antar objek, korelasi antar objek, serta keterkaitan variabel dengan objek. Agar selanjutnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Pemetaan kondisi permasalahan kesejahteraan sosial pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dilakukan menggunakan dua puluh enam variabel yang diambil dari dua puluh enam jenis PPKS dan sembilan belas

kabupaten/kota sebagai objek. Dari sembilan belas objek dan dua puluh enam variabel yang telah di paparkan akan dilakukan analisis *biplot* menggunakan software R sebagai pembantu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini membahas tentang pemetaan permasalahan kesejahteraan yang diambil dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*, sehingga penelitian ini diberi judul **“Pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2020 Menggunakan Analisis *Biplot*”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah pemetaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan karakteristik PPKS di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*?
2. Indikator apa saja yang mencirikan indikator PPKS di setiap pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*?
3. Bagaimana keragaman dari indikator PPKS di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*?

4. Apakah terdapat hubungan antar masing-masing indikator PPKS di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Mengetahui pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan karakteristik PPKS di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*.
2. Mengetahui indikator apa saja yang mencirikan indikator PPKS di setiap pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*.
3. Mengetahui keragaman dari indikator PPKS di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*.
4. Mengetahui hubungan antar masing-masing indikator PPKS di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menggunakan analisis *biplot*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, mendapat pengetahuan tentang kesejahteraan sosial dan menambah pemahaman dalam menggunakan analisis *biplot*.
2. Bagi pemerintah, sebagai informasi atau bahan acuan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan untuk menekan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.